

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tafsir Politik (Corak Tafsir yang menafsirkan ayat al-Qur'an bernuansa politik)

Di penghujung rezim Orde Baru, para aktivis, LSM, jurnalis, cendekiawan, dan tokoh agama mengangkat isu penegakan keadilan sebagai salah satu bendera gerakan reformasi. Karena berurusan dengan pejabat dan penguasa saat itu terasa monoton, hal ini disadari menjadi signifikan. Masalah keadilan ini menjadi bahasan lima artikel tafsir yang ditulis oleh Syu'bah, antara lain: "Keadilan dan Kesaksian Allah", "Yang Disebut Adil", "Keadilan atau Kehancuran", "Keadilan dan Kebencian", dan "Keadilan dan Mantan Presiden" hanyalah beberapa buku yang membahas tentang keadilan. Hal ini menunjukkan keseriusan Syu'bah dalam menegakkan keadilan. Ketika topik keadilan diangkat dalam konteks wacana teologis klasik, hal itu biasanya dibahas dalam kerangka keadilan Tuhan daripada keadilan manusia di Bumi. Kita, sebagai orang beriman, bisa dengan mudah menyatakan bahwa Allah Maha Adil tanpa perlu berdebat panjang lebar. Yang penting adalah apakah dan bagaimana keadilan memanasifestasikan dirinya dan memengaruhi keberadaan manusia. Di sinilah kemudian Syu'bah menarik masalah keadilan ke dalam konteks kehidupan riil. Ia menjelaskan tentang "Apa yang disebut Adil" ketika mengulas kandungan QS. Al-Nahl [16]: 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keadilan adalah perhatian utama Syu'bah dalam eksistensi manusia. Dia menyatakan, mengutip Plato, bahwa seorang pemimpin negara yang akan mengawal keadilan harus memenuhi banyak syarat. Dengan kewenangannya, mereka akan menjalankan pemerintahan. Agar penegakan keadilan tidak dilandasi oleh kebencian golongan, suku, ras, atau agama, mereka harus menjadi orang-orang yang berakal. Syu'bah mulai

mengkritisi praktik politik rezim Orde Baru yang berlandaskan kebencian dan kepentingan kelompok serta mempermainkan keadilan, dari sudut pandang ini. Tak Tergoyahkan dan Jelas Dalam Pancaran Al-Qur'an Syu'bah menulis:

Dalam berbagai kasus, bagaimana keadilan dilaksanakan di tengah kemungkinan permusuhan? Misalnya, apakah Soeharto sadar bahwa dirinya mungkin terlibat dalam G.30S. wabah PKI? Bung Karno juga menjadi penerima pertanyaan ini. Sejujurnya, apakah kudeta dilakukan atas nama individu atau apakah itu tanggung jawab partai dari salah satu sayapnya? Isu ini juga diangkat terkait dengan keikutsertaan Masyumi dalam pemberontakan PRRI. Apakah perlu demi demokrasi bagi kita untuk menyerah pada kekuatan yang menentang demokrasi? Apa sebenarnya Supersemar yang manuskripnya dianggap hilang, dan dalam kondisi apa Bung Karno menandatangani? Misalnya, peran apa yang dimainkan Benny Moerdani dan Try Sutrisno dalam kasus Tanjung Priok, serta apa yang dimainkan oleh Suharto dan/atau satu atau dua petinggi lainnya dalam penculikan aktivis pada tahun 1990? Bagaimana dengan mahasiswa Trisakti yang tertembak? Rezim Orde Baru pimpinan Soeharto mengebiri kekuatan-kekuatan politik, baik yang terkait dengan PKI maupun yang dianggap menghalangi kekuasaannya saat itu, atas nama stabilitas sosial dan politik. saat mendeskripsikan konten QS. [6] Al-An'am: 65, misalnya, Syu'bah tampak memiliki sikap kritis yang tegas dan lugas.⁵

2. Kritik Sosial

Marx melihat sejarah manusia dari dua sudut pandang: pertama, faktor ekonomi, yang menggambarkan serangkaian tahapan dalam perkembangan ekonomi manusia, termasuk bagaimana kebutuhan hidup diproduksi dan mempengaruhi semua perubahan dalam kehidupan manusia. Kedua, ada aspek sosial karena Marx mengatakan bahwa orang secara alami suka bersosialisasi. Akan tetapi, faktor sosial tidak lengkap tanpa adanya kontak langsung dengan faktor ekonomi, karena kehidupan sosial manusia tidak akan bertahan lama kecuali manusia menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masyarakat di sekitarnya.⁶

⁵ Islah Gusmian, "Paradigma Penelitian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia," *Empirisma* 24, no. 1 (2016): hal-1–10.

⁶ E Walsh, *The Corporate Directory of US Public Companies 1995*, (Palgrave Macmillan UK, 2016), hal-167.

Marx mengakui bahwa orang datang ke dunia pada waktu yang berbeda. Akibatnya, cara dan hubungan pengeluaran bergerak melalui berbagai tahap perkembangan tenaga produktif material. Kepemilikan kekuatan produktif tertentu dan hubungan sosial yang awalnya berfungsi untuk membangkitkan kekuatan ini mewakili setiap mode produksi. Hubungan properti, yang akan mencakup kelas-kelas sosial, akan menjadi aspek utama dari hubungan ini. Akibatnya, muncul dua kelompok berbeda berdasarkan jenis aset yang memengaruhi berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika kelas digunakan untuk menghasilkan kekayaan dari properti, kelas itu akan menguasainya.⁷ Marx menyarankan bahwa setiap masyarakat harus melalui lima tahap produksi yang berbeda: komunisme primitif, perbudakan klasik, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme. Namun, penemuan-penemuan baru seperti penggunaan mesin uap, pembangunan kapal layar, dan sebagainya merupakan contoh inovasi yang telah dilakukan sebagai akibat dari perubahan kebiasaan belanja dan pergaulan. Marx adalah satu-satunya yang percaya bahwa situasi ini akan lebih menekan metode pengeluaran saat ini karena sejarah perubahan akan menunjukkan perjuangan kelas, atau oposisi dari satu kelas ke kelas lainnya. Persepsinya adalah bahwa sebuah revolusi sedang terjadi, menandai era baru dalam sejarah. Akibatnya, tahapan baru akan melahirkan kelas penguasa baru yang akan menentang kelas pekerja dan petani, yang merupakan kelas bawah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita menganggap bagaimana uang dibelanjakan sebagai tanda kelas sosial.⁸

Hubungan antara individu dan alam yang menggantikan dan dibatasi melalui pengeluaran unik telah melahirkan cara dan prasyarat baru untuk mengatasi masalah masyarakat. Marx mengabadikan hubungan ini dalam teori materialisme dialektisnya, yang menekankan pada tiga rangkaian rumusan: tesis, antitesis, dan sintesis. Misalnya, tesis dari abad pertengahan tercermin dalam deskripsi Marx tentang lima tahap mode pengeluaran, khususnya tahap feodalisme. Kapitalisme dianggap

⁷ V G Gavriljuk and H Berns, *High Nitrogen Steels: Structure, Properties, Manufacture, Applications*, Engineering Materials (Springer Berlin Heidelberg, 2013), hal-45.

⁸ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48.

sebagai antitesis dari tahap Feodalisme jika kebangkitan kelas menengah—kelas borjuis—menentanginya, dan seterusnya hingga Komunisme, yang dianggap sebagai Sintesis, menggantikannya. Perjuangan kelas buruh untuk membebaskan diri melalui proses revolusi dari belenggu penindasan kelas kapitalis dibantu oleh proses “dialektis” ini sebagai senjata moral. Akibatnya, perilaku manusia menjelma menjadi "subjek" dialektis perubahan sosial. Akibatnya, organisasi pekerja sosial dengan persyaratan baru muncul, dan pada akhirnya, output mereka tiba-tiba meningkat. Menurut Marx dan Engels, serangkaian kontradiksi yang muncul dari konsep dialektis merupakan akar penyebab fenomena sosial seperti konflik kelas. Akibatnya, gagasan materialisme dialektis dianggap telah mencapai tujuannya untuk membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial ekonomi dengan memberikan kekuasaan peralihan menuju titik tertinggi dalam sejarah manusia.⁹

Marx dalam Kemiskinan Filsafat membahas kelas tertindas, khususnya proletariat menegaskan bahwa unsur-unsur “antagonisme kelas”, yang mendorong keinginan untuk bebas dari penindasan, muncul sebagai akibat dari skenario eksploitasi terhadap mereka. Setelah itu, motivasi utama mereka untuk menciptakan struktur sosial baru adalah keinginan ini. Akibatnya, hubungan sosial tidak akan lagi dapat mencapai kerja sama antara dua model kelas jika mereka berhasil menguasai kekuatan produktif. Akibatnya, kelas revolusioner itu sendiri adalah kekuatan produktif mereka. Kelas ini akan menggunakan kekerasan dan kekejaman, seperti perebutan kekuasaan secara revolusioner, untuk mendorong perubahan struktur sosial. Ini karena Marx membayangkan proletariat sebagai kelas penguasa ketika berhasil merebut posisi kelas borjuis dan memusatkan semua alat produksi di tangan kelas pekerja.¹⁰

Namun, sistem kelas sosial feodalisme dan kapitalisme yang ada di masa lalu tidak akan hadir dalam model masyarakat kelas baru yang akan diciptakan oleh kaum proletar. Sebaliknya, kebebasan kelas pekerja hanya digunakan untuk menghilangkan semua kelas sosial. Kesenjangan antara kelas sosial akan menutup dalam masyarakat tanpa kelas yang mereka

⁹ Indriaty Ismail and Mohd Zuhaili Kamal Basir, “Karl Marx Dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial,” *International Journal of Islamic Thought* 1, no. 1 (2012): 27–33.

¹⁰ Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” hal-25.

perjuangkan, dan orang-orang akan memiliki kendali lebih besar atas daya beli. Akibatnya, masyarakat tidak lagi mengalami penindasan melalui struktur kekuasaan. Sementara itu, permusuhan dan ketidaksepakatan antara proletariat dan borjuasi hanya dapat digambarkan sebagai perjuangan kelas-lawan-kelas yang pada akhirnya menghasilkan manifestasi sepenuhnya dari revolusi total.

Kajian mendalam Marx tentang Revolusi Prancis, khususnya kegagalannya mengatasi masalah sosial saat mendistribusikan kembali kekayaan ekonomi bangsa, menjadi dasar analisisnya tentang konsep revolusi secara keseluruhan. Kesannya adalah bahwa Marx telah mengungkapkan sebuah konsep revolusioner baru yang dikenal sebagai Praksis Revolusioner. Konsep ini merujuk pada penyatuan teori dan praktik, penyatuan konsep dan tindakan, serta penyatuan unsur-unsur objektif dan subjektif. Hal ini karena Marx meramalkan bahwa proletariat, khususnya kelas pekerja, akan mengalami transformasi signifikan yang secara kolektif akan membentuk kembali fondasi ekonomi masyarakat dan memulai revolusi sosialis besar-besaran. Meskipun demikian, Marx berpendapat bahwa keberhasilan revolusi bergantung pada mobilisasi progresif kelas pekerja itu sendiri, bukan pada bantuan kelas atas, seperti yang dilakukan orang utopis pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi.¹¹

Marx menolak komentar yang dibuat oleh sejarawan kelas menengah yang berpendapat bahwa kebangkitan kelas borjuis akan mengakhiri perjuangan kelas. Persepsi para ekonom klasik tentang sistem kapitalis sebagai sesuatu yang abadi dan berkelanjutan mendorong tanggapan ini. Ini karena harapan Marx bahwa peningkatan kesadaran dan kekuatan proletariat industri akan mengarah pada keadilan ekonomi, yang akan melanjutkan perjuangan kelas dan perubahan revolusioner. Hal ini ditunjukkan oleh surat Marx kepada Weydemeyer pada tanggal 5 Maret 1852, di mana ia menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan kelas lebih ditentukan oleh perkembangan produksi sejarah daripada bentuk masyarakat yang abadi. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perjuangan kelas adalah menghapuskan

¹¹ S W Perry, *The Angel's Mark: This Bestseller Is Perfect for Fans of CJ Sansom, Rory Clements and S. J. Parris.*, ed. S.W Perry, Atlantic B, The Jackdaw Mysteries (London: Corvus, 2018), hal-78.

sistem kapitalis dan mendirikan masyarakat tanpa kelas (komunisme).¹²

Belakangan para pemikir Marxis memperdebatkan taktik perjuangan kelas yang sering digunakan. Istilah "Kediktatoran Proletariat" digunakan dalam strategi ini. Memahami teori Marx tentang bentuk masyarakat komunis dan fungsi negara proletar sangat bergantung pada gagasan ini. Marx dan temannya Engels memiliki ciri-ciri bangsa yang akan kokoh berdiri sebagai bangsa minoritas yang mewakili kepentingan kelas kecil dan akan digunakan sebagai alat dominasi dan penindasan kelas. Meskipun kadang-kadang melibatkan kedua bentuk kekuasaan tersebut, Marx menyebut gagasan Kediktatoran Proletariat sebagai pernyataan tentang ciri-ciri kekuasaan politik kelas. Begitulah bentuk kekuatan politik akan membentuk karakter kelas sosial.¹³

Marx melihat Komune Paris sebagai model perjuangan antara kapitalis dan pekerja serta tindakan pemberontakan pertama proletariat dalam industri modern. Manifesto Komunis oleh Marx dan Engels telah mengusulkan Aturan Politik Kelas Buruh, yang menyerukan kelas bawah untuk mengontrol negara sehingga mereka dapat menggunakan keterampilan politik mereka untuk menjauhkan semua kapital dari tangan kaum buruh. kelas rata-rata dan menyusun semua metode produksi di bawah kendali dan arahan negara. Mereka ditafsirkan sebagai upaya untuk mengakhiri hak istimewa kaum borjuis. Marx telah mendorong kelas pekerja untuk merebut dan mengontrol administrasi negara agar lebih adil dan dibatasi oleh sebagian besar, mengingat pengalamannya selama Pergolakan Prancis tahun 1789. Terlepas dari perdebatan Babouvist-Blanguis mengenai pentingnya istilah tersebut "kediktatoran", Engels menekankan bahwa unsur-unsur "kediktatoran" diperlukan sebagai tanggapan atas rencana sebelumnya untuk mendirikan kerajaan baru dengan menghancurkan yang sudah ada. hubungannya dengan hukum perburuhan.¹⁴

Sejak Marx berada di Paris pada tahun 1844, komunisme pertama kali diperkenalkan dengan ide-ide Marxisme. Marx meramalkan, berdasarkan penelitiannya terhadap struktur

¹² Ismail and Kamal Basir, "Karl Marx Dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial." hal-102.

¹³ Pemikiran-pemikiran Karl Marx, "Pemikiran-Pemikiran Karl Marx," no. October (2019),hal-253.

¹⁴ Perry, *The Angel's Mark: This Bestseller Is Perfect for Fans of CJ Sansom, Rory Clements and S. J. Parris.* Hal-85 London.

masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalis, bahwa di masa depan akan muncul sistem komunis yang memandang dunia sebagai sesuatu yang berubah, bukan statis. perubahan terus-menerus mirip dengan teori dialektika Hegel. Marx menegaskan bahwa proses perubahan sejarah dimulai dengan komunisme dan berkembang melalui feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme sebelum mencapai komunisme. Revolusi buruh (proletariat), yang berfungsi sebagai inspirasi bagi seluruh umat manusia, bertanggung jawab atas setiap transformasi sejarah ini. Kelas pekerja akan mencapai kebebasan "universal" melalui revolusi, yang juga akan mewakili semua orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Karena fakta bahwa Marx dan Engels tidak memberikan penjelasan khusus tentang kerangka komunisme pasca-revolusioner, revolusi proletar hanya dipahami secara konvensional. Hal ini karena keinginan Marx untuk menghindari diasosiasikan dengan ahli utopis sosialis yang menawarkan banyak penjelasan dalam bentuk masa depan yang imajinatif atau imajinatif.¹⁵

3. Critical Discourse Analysis

Pemikiran Arkoun harus dipahami dengan memahami beberapa kata kunci. Karena sulitnya berkomunikasi dengan para akademisi yang masih tertanam kuat dalam pemikiran era akademik, para intelektual muslim jarang terlibat dalam kritik epistemologis ini. Dia juga harus berurusan dengan orientalis yang sudut pandangnya menimbulkan kecurigaan. Pada titik ini, Arkoun berbicara dengan berani tentang logika Islam dan pemikiran Islam kontemporer. Fenomena sakralisasi pemikiran keagamaan atau taqdis al-afkar ad-din yang resisten terhadap kritik (lighairi qabil li an-niqash) telah menutup pemikiran Islam. Memahami makna kritik epistemologis ini merupakan kunci untuk memahami kritik terhadap perkembangan pemikiran Islam klasik secara menyeluruh. Pemikiran keagamaan konvensional yang sebenarnya terbatas pada kurun waktu dan ruang tertentu, ditengarai telah melahirkan keilmuan agama Islam yang dianggap sebagai produk sejarah.¹⁶

Sekalipun Islam dapat diterapkan secara doktrinal di mana saja dan kapan saja, namun menjadi profan untuk dikritisi dan

¹⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi MModern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007. Hal- 54.

¹⁶ M Amin Abdullah, "Pengembangan Metodologi Studi Islam Pendekatan Hermeneutika Budaya Dan Sosial," *Tarjih* 6 (2003): hal-1–19.

diuji validitasnya ketika menjadi pemikiran dan praktik keagamaan. Akan tetapi, ketika Islam memasuki domain sosial, politik, dan ekonomi tertentu, ia memperoleh nilai yang tidak hanya transenden secara universal tetapi sudah membawa aroma khas wilayah itu. Arkoun mengamati, berlawanan dengan "Moral Politik Islam Kontemporer", bahwa otoritas publik Nabi di Medina mewakili puncak kemajuan gemilang dan akan sulit ditiru. Negara Madinah adalah negara yang ideal untuk pemerintahan Islam mana pun karena tidak harus bergantung pada teks-teks dari era klasik atau abad pertengahan yang direduksi menjadi model Khalifah dan Imamah. Arkoun menyatakan bahwa itu tidak lagi cocok untuknya, menunjukkan bahwa pemikiran ilmiah "Sarjana" tidak dapat berkembang tanpa merusak pengetahuan yang ada.¹⁷

Pengamatan Arkoun, masyarakat Islam telah meyakini bahwa Islam politik dan agama tidak dapat dipisahkan karena Nabi mendirikan aparatur negara dan sistemnya di Madinah, sehingga keduanya terkait secara struktural. Dia menegaskan bahwa Nabi mendirikan "Negara Islam" di Madinah antara tahun 622 dan 632. Pada saat yang sama, dia terus menyebarkan wahyu Al-Qur'an, yang dimulai di Mekah antara tahun 610 dan 612, dan kekhalifahan secara bertahap didirikan di Madinah, pertama pada tahun 632 dan 661, kemudian di Damaskus dari 661 sampai 750, dan terakhir di Bagdad dari 750 sampai 1258. Arkoun menitikberatkan pada sejumlah isu mendasar dalam kajian politik Islam selama kurang lebih empat belas abad. Masalah-masalah yang ada pada masa klasik terus berlanjut sepanjang Abad Pertengahan dan berlanjut hingga tahun 1950, yang menandai kemerdekaan umat Islam dari penjajahan, dimulai dari Mesir, Al-Jazair, Maroko, Sudan, dan Indonesia semuanya lepas dari kendali negara. penjajah dan mencari cara untuk bersatu menjadi bangsa baru.¹⁸

¹⁷ Ibrahim M. Abu Rabi', "A post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History" Religius perspective on the Causes and Consequences, Oxford: Oneword Publication, 2002, hal-1-30.

¹⁸ Kegelisahan akademik para ilmuwan *Islamic Studies* sebahagian dihimpun secara baik oleh Charles Kurzman. *Liberal Islamic A Sourcebook*, (New York: Oxford University Press, 1998). Sudah barang tentu uraian ini terlalu digeneralisasikan karena mulai ada beberapa cendekiawan muslim Indonesia yang menyadari pentingnya hal ini sesehingga mendorong munculnya matakuliah Sejarah Sosial Hukum Islam. Lebih Lanjut M. Atho Mudzhar, "Social History Approach to Islamic Law" *al-jami'ah* No 61/1998. hal-87-88.

Arkoun tidak sependapat dengan kelompok ekstremis atau fundamentalis yang dalam garis perjuangannya ingin mengembalikan model ideal Madinah secara total. Kelompok-kelompok ini memandang Madinah sebagai otoritas eksistensial yang tidak dapat ditumbangkan, dan karena ingin mendirikan negara Islam di Madinah, kelompok-kelompok ini menyerang pemerintah dengan menghilangkan legitimasi sistem yang berkuasa. karena mereka percaya mereka terlalu asing atau kebarat-baratan.¹⁹

Sejalan dengan pandangan Arkoun, kaum intelektual liberal menuntut pemisahan antara agama dan negara dan menyarankan kepada para ulama untuk menangani urusan kependetaan dan menyerahkan pengelolaan urusan negara kepada para politisi. Nabi Muhammad dan para sahabatnya belum tentu benar di zaman kita. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah melahirkan tingkat pemerintahan dan kebudayaan yang tinggi dan gemilang bagi umat Islam yang bermarkas di Arabia, bahkan mereka menciptakan sebuah kerajaan yang mengalahkan kerajaan-kerajaan lain, Byzantium, Persia dan lain-lain sebelum Islam lahir, akan tetapi seluruh kekaisaran termasuk Kekaisaran Ottoman telah hancur selama beberapa generasi. Permasalahannya adalah beberapa negara mayoritas Muslim ingin mengubah sistem pemerintahan yang dianut dari Barat dengan sistem pemerintahan yang mencontoh negara Madinah, karena mereka yakin bahwa model negara Madinah dan Alquran sebagai konstitusi dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. orang dan bangsanya. Menurut Arkoun, persoalannya tidak sesederhana itu, karena menurutnya kepemimpinan Nabi yang mendirikan negara Madinah merupakan kepemimpinan transenden yang berada dalam kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Kehidupan berbicara kepada manusia dan hakim yang kemudian melegitimasi politik. kekuatan Nabi dan para pengikutnya. Di sini kita kurang memperhatikan hubungan “halus” yang ada antara otoritas yang realisasinya bergantung pada konsistensi pemaksaan yang diajukan oleh diskursus dan kekuatan politik di Madinah. Arkoun ingin menjelaskan kepada kita bahwa kepemimpinan Nabi di Madinah tidak terlepas dari kekuasaan politik dan otoritas Ilahi, maka jika kita menilai pemerintahan Nabi adalah

¹⁹ Mohammed Arkoun, *Tarikhyyah al-Fikr al-'Araby al-Islamy*, Libanon; Markaz al-inma al-qaumy, 1986, hal-51-63.

pemerintahan yang bersifat resiprokal, bahkan dalam berbagai urusan Tuhan sendiri langsung melibatkan diri untuk melawan musuh. Lebih lanjut Arkoun, sebagai sejarawan dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial, mengatakan bahwa kepemimpinan Nabi dan para sahabat merupakan sebuah episteme pada era Islam klasik, karena bagaimanapun pemikiran itu dibangun pada era tersebut. Islam awal merupakan masa diresapinya ruh al-Qur'an dalam diri umat Islam yang dipimpin Nabi. Agama ini berperan penting dalam pembentukan budaya yang sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu budaya universal, untuk mengembalikan apa yang disebut Arkoun sebagai “Agama Kekuatan, determinasi agama, cakrawala metafisik”, dan seterusnya. Inilah barangkali yang disebut Fazlur Rahman sebagai “fase sunnah nonformal”.²⁰

Arkoun tidak sependapat dengan cara yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki yang membantai sistem pemerintahan Khilafah dan secara revolusioner menggantikan dengan sistem negara sekularisme radikal menyerupai tindakan kalangan revolusioner pada saat revolusi Perancis dan tindakan ini telah membangkitkan reaksi yang sengit dari kalangan agamawan tradisional. Tetapi tidak menghasilkan gerakan-gerakan kemasyarakatan yang besar yang mampu mempengaruhi kesadaran kolektif. Di sinilah perbedaan tindakan Attaturk dengan apa yang terjadi di Prancis.

Arkoun dengan cermat mengamati sejarah setelah wafatnya Nabi, yang diikuti oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, di samping alasan-alasan di atas. Kematian tragis ketiga khalifah tersebut disebabkan oleh fakta bahwa sistem kekhilafahan dibangun di atas fanatisme suku atau kesukuan dan kekerabatan, yang berujung pada pembunuhan dan kemenangan politik pihak Umawi atas Bani Hasyimi, setelah itu keturunan Hasyimi kembali ke tanah air. memimpin Dinasti Abbasiyah. Hal ini terjadi karena budaya Arab pada saat itu sangat anti etnis, warisan leluhur mereka (Turast) tidak dapat diberantas oleh ajaran Islam, sehingga fanatisme tetap bertahan dan mempengaruhi politik setelah wafatnya Nabi.

Arkoun menolak mendirikan negara Islam karena alasan-alasan tersebut di atas. Dia mendukung pembentukan negara

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago and London : The University of Chocago Press, 1982, hal-13-42.

demokratis yang tidak mengakui ketidaksepakatan antara alasan filosofis dan alasan agama. Otoritas berdasarkan interpretasi spiritual atas teks harus dihapuskan, usulnya. Ini tidak berarti bahwa Arkoun, seorang ilmuwan yang mendapat gelarnya dari Prancis (Barat), segera membongkar hegemoni Islam (Timur) yang dianggapnya kurang rasional dan tidak demokratis. Sebaliknya, Arkoun mengadopsi semua ide Barat karena dia selektif dan berhati-hati dengan apa yang terjadi di Barat. Bahkan, Arkoun mengkritik Barat sekali lagi, mengklaim bahwa Barat adalah tempat lahirnya modernitas, bukannya mempertanyakan efek positif dan negatif dari pengalamannya.²¹

Arkoun menegaskan bahwa perbedaan otoritas dan kekuasaan merupakan persoalan krusial dalam pemerintahan karena sulitnya membedakan keduanya dalam sistem Islam, yang sering mengakibatkan penyalahgunaannya. Dia mengatakan bahwa otoritas adalah lembaga legitimasi yang berasal dari hubungan pribadi yang tidak harus mengikuti aturan fisik atau hukum. Itu dimulai ketika satu orang terikat pada kata-kata atau tindakan orang lain yang mengatasinya. Sementara itu, kekuasaan ada di luar mereka yang dikendalikan dan bergantung pada dukungannya (batasan dan otoritas yang disebutkan sebelumnya).

Sementara kekuasaan politik tercermin dalam dunia nyata di Madinah atau dalam politik kontemporer, kekuasaan didefinisikan dalam konstitusi, dan kekuasaan adalah penerapan amanat konstitusi, kekuasaan Nabi secara keseluruhan, terbukti bahwa kekuasaan pada masa Nabi didasarkan pada keteguhan makna yang diambil dari wacana Alquran. baik tindakan historis karismatik maupun struktur semantik, retorik, dan sintaksis dari wacana Al-Qur'an memperjelas hal ini. Citra otoritas yang utuh dan hidup ini mengalami dua perubahan setelah kematiannya. Kompilasi, interpretasi, dan terjemahan Hadits dan Al-Qur'an menghasilkan tradisi kitab suci.

Arkoun menyatakan bahwa sastra Iran yang membahas raja-raja Sasanid, dan sastra Yunani yang membahas raja-filosof mengandung fantasi politik Islam yang selalu mengacu pada pandangan tradisional Arab mengenai penguasa atau kekuasaan dan berpihak pada keturunan (Sayyid – penguasa). dan baru-baru ini, melalui literatur Kristen dari Byzantium (Roma

²¹ Amin Abdullah, hal-47.

Timur), yang menggambarkan kaisar sebagai kehadiran surgawi.

Menanggapi uraian simbolik di atas, yang telah membentuk kondisi psikologi sosiologis-kultural dan mendominasi kesadaran kolektif para cendekiawan Muslim, Mawardi dan Al-Ghazali, keduanya adalah pemikir abad pertengahan yang pandangannya tentang faktor politik dalam tradisi Islam secara keseluruhan terbatas pada keadaan pikiran yang terbatas, tanggap hal di atas. cendekiawan muslim. Ketidacukupan ilmu politik secara keseluruhan sebagian besar disalahkan atas kegagalan literatur saat ini tentang Islam dan politik. Karena definisinya yang sempit, ilmu politik modern telah kehilangan hubungannya dengan aspek lain dari usaha manusia secara keseluruhan. Karena tidak mempertimbangkan masalah etika fundamental, ilmu politik kontemporer tidak memadai.

Yang juga sangat menyedihkan adalah kontribusi dan formulasi para penulis Islam tentang teori politik Islam. Sebab, secara umum, tulisan-tulisan tersebut lebih bersifat doktrin politik daripada teori politik atau filsafat dan etika politik. Sarjana politik Islam secara khusus menggambarkan struktur lembaga pemerintahan Islam awal, yang pernah dianggap suci, atau dijabarkan dalam teks-teks hukum dari periode klasik dan abad pertengahan dalam perdebatan antara politik dan agama. Sebenarnya kecenderungan ini meringkas dan menghasilkan suatu keadaan darurat dalam pemikiran politik Islam hari ini. Apa yang disampaikan Mumtaz Ahmad dalam bukunya *The Problems of Islamic Political Theory* menarik:

Cakupan isu yang dianggap terkait dengan perumusan gagasan politik dan sosial yang koheren cenderung terkendala oleh penerapan teori dan asumsi sebelumnya yang tidak kritis. Diperlukan pemeriksaan ulang yang komprehensif terhadap konseptualisasi dan asumsi fenomena politik sebelumnya. Alasan utamanya bukan karena ide-ide ini salah ketika dibuat, tetapi karena mereka telah tertinggal jauh di belakang perubahan yang telah terjadi dalam 200 tahun sehingga mereka tidak dapat menawarkan solusi yang relevan, dunia nyata, atau berguna. masalah yang mereka buat untuk dipecahkan.

Tujuan etika politik adalah mengkritisi legitimasi politik secara rasional, objektif, dan argumentatif dalam setting ini. Tujuan etika politik bukan untuk terlibat dalam politik yang sebenarnya melainkan untuk mendukung penyelesaian masalah ideologis secara objektif. Sebagai standar orientasi dan

pedoman bagi para politisi untuk menjalankan kekuasaan secara bermartabat, etika politik Perlu diperhatikan bahwa kebangkitan cara berpikir politik dimulai pada awal periode modern, setelah runtuhnya politik adat. Selain itu, kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat menuntut keputusan politik yang lebih tepat. Politik dan kekuasaan, di sisi lain, membutuhkan etika politik untuk menjaga martabat manusia ketika negara semakin menguasai kehidupan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan pencarian penulis tafsir sosial politik Syu'bah Asa terkait karya ilmiah, artikel, buku, atau laporan penelitian. Agar posisi penulis dalam penelitian ini jelas dan terukur secara akademis, maka penulis akan berupaya memetakan dan mengkategorikan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini, menjelaskan argumentasi dari masing-masing penelitian tersebut, kemudian melihat dan menganalisis gap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penulis menemukan Sahabat MHD Al Mujimi, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam tesisnya berpendapat bahwa tafsir Syu'bah Asa tergolong tafsir bi al-ra'yi, yang menghadirkan pendekatan kontekstual maudhu'i (tematik).) interpretasi dengan analisis sosio-ekonomi yang tepat. sejarah politik Al-Qur'an diposisikan sedemikian rupa sebagai kritik sosial. Syu'bah memulai penafsirannya terhadap ayat tersebut dengan menampilkan ayat yang berhubungan atau berkorelasi dengan topik yang sedang dibahas. Dia kemudian menafsirkan ayat tersebut menggunakan ayat lain dan menjelaskan ayat kuncinya pada saat yang bersamaan..²²

Selain itu, penulis menemukan dalam karyanya Tafsir Al-Qur'an dan kritik sosial dalam Jurnal Islah Gusmian: Dalam Dinamika Tafsir Alquran di Indonesia, Syu'bah Asa: Dalam karyanya, Islah mengungkapkan bahwa Syu'bah telah berhasil menghubungkan isu-isu sosial politik yang muncul pada masa Orde Baru dengan topik-topik yang ditafsir dalam ayat-ayat Alquran. Penegakan keadilan yang tidak bermoral, penindasan rezim dan pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik korupsi yang menjerat birokrasi Orde Baru

²² Fakultas Ushuluddin et al., "No. 127/IAT-U/SU-S1/2020 NARASI-NARASI POLITIK DALAM AL- QUR'AN MENURUT SYU'BAH ASA," no. 127 (2021).

adalah di antara topik-topik ini. Latar belakang pekerjaan Syu'bah sebagai jurnalis memberikan salah satu ciri yang dimilikinya.²³

Penulis juga menemukan dalam skripsi Achmad Yusuf prodi ilmu al-Qur'an dan tafsir Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, ia mengungkapkan dalam skripsinya bahwa Syu'bah telah memberikan upaya untuk menguraikan tafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan konteks pada masanya. Tafsirnya mampu menjadi bukti dinamika penafsiran di Indonesia, Syu'bah berhasil memberikan nuansa kebahasaan pers dalam tafsirnya. Karyanya banyak menjawab peristiwa-peristiwa diskriminatif, korupsi dan kepemimpinan, selain karena tafsirnya lahir tepat dua tahun setelah rezim orde baru berakhir isinyapun menjawab dan menggambarkan fenomena-fenomena masa lalu. Belum bisa terlupakan dipikiran kita zaman orde bobrok banyak keganjalan pada aparat pemerintah yang menyebabkan amarah rakyat tidak bisa dihentikan pada demo 98.²⁴

Penulis juga menemukan di jurnal Sunarto Institut PTIQ Jakarta bahwa tafsir ini merupakan langkah maju yang sangat perlu diapresiasi atas keberanian para mufassir/penulis dalam mengasah ayat-ayat Alquran, bukan sekedar tafsir teks dalam Alquran. . Susanto juga menulis dalam jurnalnya bahwa penafsiran ini merupakan langkah maju. saja, tetapi mufassir menghidupkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks dinamika sosial dan politik masyarakat saat ini. Mungkin saja ketajaman juru bahasa itu ditujukan pada pedang Raja saat itu. Karena keberanian para mufassir dalam mengemukakan pemikirannya saat ini, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi tafsir tersebut.²⁵

Dari hasil penelitian penulis, penulis mendapati dalam Jurnal karya Miftahul Umam Uin Sunan Kalijaga Jogja, ia menuturkan dalam jurnalnya sebuah karya penafsiran kontekstual yang terhubung dengan sosio-politik pemerintahan orde baru, muatan tafsir ini dikembangkan dalam wacana kritis, lugas dan berani. Ia menegaskan bahwa teks al-Qur'an sepatutnya dibaca dalam konteks sosial ketika al-Qur'an diturunkan, pembacaan ini sangat berguna untuk menemukan legal moral suatu ayat agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan, penafsiran Syu'bah adalah suatu contoh apik dari

²³ Gusmian, "TAFSIR AL-QUR'AN DAN KRITIK SOSIAL: Syu'bah Asa Dalam Dinamika Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia." hal-15.

²⁴ Manajemen Syariah et al., *2020 M / 1441 H*, 2020. hal-27.

²⁵ Sunarto Sunarto, "Dinamika Tafsir Sosial Indonesia," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 1 (2019): hal-83–95.

beragam interpretasi kontekstual, tafsir ini merupakan sumbangsih terbesar dalam hidupnya terhadap problem penafsiran di Indonesia yang mana ia bergerak dalam ruang sosio-politik yang belum banyak digeluti oleh mufassir-mufassir sebelumnya.²⁶

Oleh karena itu, penulis kajian ini akan berkonsentrasi pada penelitian yang secara luas terkait penerapannya dalam tafsir sosial politik buku sosial politik Syu'bah Asa Cahaya Ayat Tafsir Al-Qur'an.

C. Kerangka Berpikir

Fakta sosial politik Indonesia yang bisa dibilang bobrok dalam pandangan masyarakat, bukti perlawanan sosial dimana-mana menjadi ajang kepekaan masyarakat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perlawanan masyarakat membuat Syu'bah bertekad menulis karyanya dengan dalih keberagaman yang harus dijaga kemurniannya. Suku, Agama, Ras, dan Golongsn (SARA) Syu'bah bahas dalam bukunya, membuat kita yang awam akan problem dinamika kehidupan bermasyarakat ingin ikut serta dalam keberlangsungan membangun Negeri. Dengan buku tafsir karya Syu'bah ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu senantiasa berpandangan teguh pada ayat-ayat Al-Qur'an.

²⁶ Jurnal Fuaduna et al., "Miftahul Umam" 6, no. 2 (2022): 179–92.